

BAB II

DEMOGRAFI DAN DINAMIKA PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDIA

Keberadaan India pada tahun 1995 hingga 2008 masih menghadapi berbagai problematika sosial yang belum mampu diselesaikan secara komprehensif dan mendasar (elementer). Salah satunya adalah perdagangan perempuan yang marak terjadi di negara ini. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang demografi India, serta perdagangan perempuan di India, mencakup pelaku, korban, latar belakang dan perkembangan pada tahun 1995-2008, dampak yang ditimbulkan, kebijakan-kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan dan keagalannya.

A. Demografi India

India merupakan salah satu negara di wilayah Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan dalam konteks internasional pada tahun 2008 jumlah penduduk India menduduki peringkat kedua dunia setelah RRC (Republik Rakyat Cina). Jumlah penduduk India adalah 1,2 milyar (1.210.193.422).¹

Sejak dekade 1990-an India mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat. Rata-rata pertumbuhannya mencapai 1,41 persen dengan tingkat kelahiran 22,2

¹ "India : Demography and Population", <http://www.worldbank.org>., diakses pada tanggal 30 November 2011.

per 1000 populasi, sedangkan tingkat kematian 6,4 per 1000 populasi. Tingkat harapan hidup masyarakat India adalah 69,89 persen pertahun.² Secara demografis ternyata masyarakat India di dominasi oleh kaum perempuan. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya fenomena perdagangan perempuan di negara ini.

Besarnya kelompok masyarakat perempuan di India ternyata merupakan tren baru yang mengemuka sejak pertengahan dekade 1980-an. Sejak saat ini dan pada tahun-tahun selanjutnya tren peningkatan jumlah penduduk perempuan terus mengalami peningkatan. Gambaran mengenai prosentase kependudukan India apabila dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Karakteristik Penduduk India Ditinjau Dari Jenis Kelamin
Tahun 2007/2008

NO.	Kategori Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-14 tahun	190,07 juta	172,7 juta
2.	14-64 tahun	321,66 juta	398,34 juta
3.	64 tahun ke atas	28,3 juta	43,8 juta

Sumber : "India : Demography and Population", <http://www.worldbank.org>, diakses pada tanggal 30 November 2011.

Melalui tabel 2.1. di atas maka dapat diketahui bahwa perempuan menjadi jenis kelamin yang mendominasi masyarakat India secara mutlak. Sebagian besar dari perempuan-perempuan India yang memiliki tingkat usia di atas 64 tahun berada di

² "India : The Book Of Fact", <http://www.cia.gov>, diakses pada tanggal 30 November 2011.

wilayah-wilayah rural yang jauh dari ibu kota New Delhi. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada peta India sebagai berikut :

Peta 2.1.

Peta Penyebaran Penduduk Perempuan India



Sumber : "India Female Sex Ratio", <http://www.mapsofindia.com>., diakses pada tanggal 28 April 2012.

Peta 2.1. dapat dijelaskan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki warna yang gelap memiliki jumlah penduduk besar. Wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk perempuan terpadat sesuai dengan peta di atas adalah wilayah Kerala, Uttarakhand, Himachal Pradesh dan wilayah sekitar Assam. Di wilayah ini jumlah perempuan di atas jumlah 120 juta jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk perempuan terkecil antara lain Jammu, Kashmir, Punjab, Maryana dan Sikkim. Di wilayah ini jumlah penduduk perempuan India kurang dari 22 juta jiwa.³

Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk India ternyata berdomisili Maharstra, Utar Pradesh dan Bihar. Selain itu, wilayah lainnya yang juga memiliki penduduk dalam jumlah besar antara lain Benggala Barat, Tamil Nadu dan Madya Pradesh. Melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang demografi India. Kemudian pada sub-bab selanjutnya akan diuraikan tentang pelaku dan korban perdagangan perempuan di India.

B. Pelaku dan Korban

Pelaku dan korban perdagangan perempuan di India memiliki karakteristik yang unik. Ini didasari pada azas saling ketergantungan dimana antara pelaku dan korban saling membutuhkan. Di satu sisi para korban perdagangan perempuan berupaya mencari peruntungan dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik,

³ "India Female Sex Ratio", <http://www.mapsofindia.com.>, diakses pada tanggal 28 April 2012

sedangkan para pelaku nantinya akan mendapatkan keuntungan dari kasus perdagangan perempuan.

Kasus perdagangan perempuan yang terjadi di India telah mengemuka sejak akhir tahun 1980-an, bahkan di wilayah-wilayah India, penyelundupan manusia telah ada sejak pertengahan tahun 1960-an. Seiring dengan berkembangnya waktu, human women trafficking di India banyak melibatkan kaum perempuan anak yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Prosentase Korban *Women Trafficking* di India
Tahun 1995-2008

No.	Tahun	Keterangan		
		Perempuan Usia > 45	Perempuan Usia > 35 - <45	Perempuan Usia <35
1.	1995-1996	3.112 (1)	4.037 (1)	2.872 (1)
2.	1997-1998	2.160 (1)	1.842 (1)	2.477 (1)
3.	1999-2000	2.277 (1)	3.048 (1)	2.656 (1)
4.	2001-2002	3.118 (2)	Na	Na
5.	2003-2004	1.088 (2)	2.998 (2)	3.876 (2)
6.	2005-2006	2.087 (3)	2.119 (3)	4.854 (3)
7.	2007-2008	1.450 (3)	2.876 (3)	6.645 (3)

Na : not available (data tidak ditemukan) (*) : merupakan angka estimasi

Tabel 2.2. di atas dapat menjelaskan bahwa perkembangan perdagangan perempuan di India sejak tahun 1995 hingga 2008 ternyata cenderung fluktuatif.

Terdapat tren peningkatan, namun juga diwarnai penurunan. Gambaran secara rinci mengenai paparan data tabel 2.2. adalah sebagai berikut :

1. Data dengan angka satu (1) menunjukkan data ini diperoleh dari situs kajian sosial <http://www.endvavnow.com>., pada situs ini dijelaskan bahwa jumlah korban human trafficking ini mencakup kasus atas inisiatif dari para korban women trafficking di India sendiri sebagai upaya mencari kehidupan yang lebih baik atau menjadi korban dalam jaringan. Pada data ini juga disebutkan bahwa masalah women trafficking di India akan menjadi kajian bersama para akademisi internasional, karena situs ini berpusat di London, Inggris secara rutin tiga bulan sekali akan mengeluarkan publikasi yang nantinya akan diteruskan kepada para stakeholder terkait, termasuk pemerintah India dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
2. Data dengan angka dua (2) menunjukkan data ini diperoleh dari situs kajian sosial <http://www.prajwalaindia.com>., pada situs ini dijelaskan bahwa jumlah korban human trafficking ini mencakup kasus atas inisiatif dari para korban women trafficking di India sendiri sebagai upaya mencari kehidupan yang lebih baik atau menjadi korban dalam jaringan. Situs ini berpusat di New Delhi India yang beranggotakan para akademisi dan budayawan. Selain menyebarkan informasi kepada publik India dan masyarakat internasional, situs ini juga berperan aktif dalam penggalangan dana untuk korban perdagangan perempuan.
3. Data dengan angka tiga (3) menunjukkan data ini diperoleh dari situs kajian sosial <http://www.chenaidhildren.com>., pada situs ini dijelaskan bahwa jumlah korban human trafficking ini mencakup kasus atas inisiatif dari para korban women trafficking di India sendiri, khususnya dari wilayah-wilayah rural sebagai upaya mencari kehidupan yang lebih baik atau menjadi korban dalam jaringan. Situs ini berpusat di New Delhi India dan juga memiliki

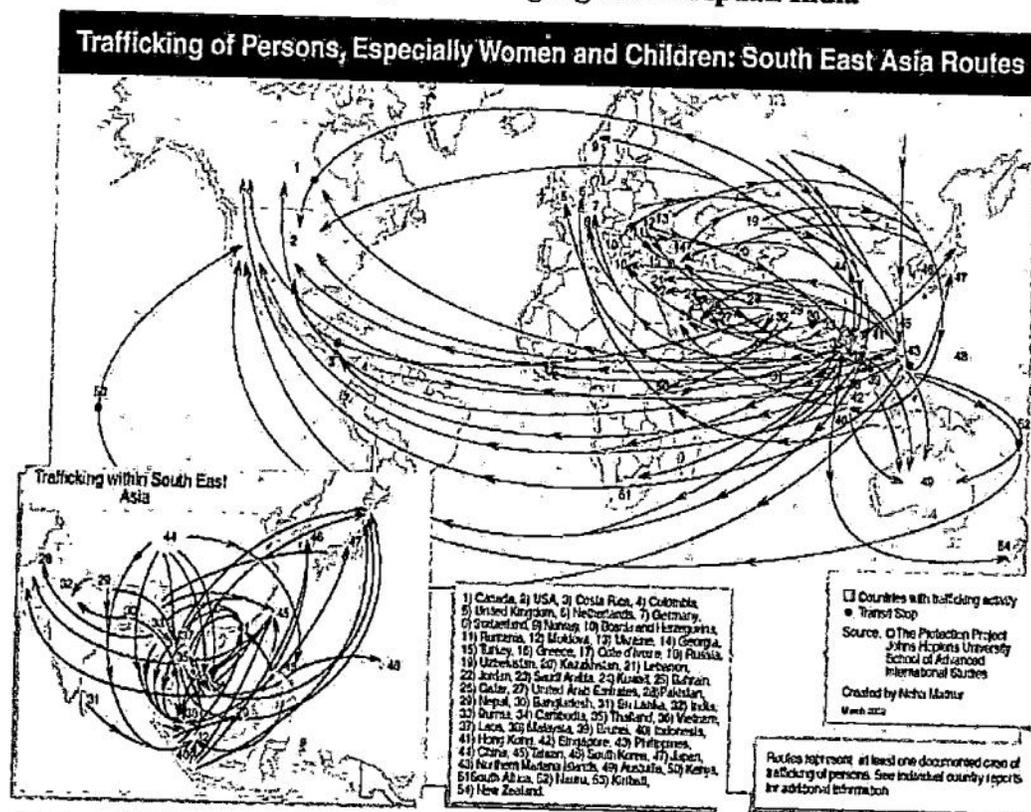
jaraingan di beberapa kota dunia lainnya antara lain Tokyo, Jepang, London-Inggris dan beberapa kota lainnya. Selain fokus terhadap perdagangan perempuan, situs ini juga menekankan kegiatannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak India.

Kasus perdagangan perempuan yang terjadi di India semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila di negara-negara Asia Selatan lainnya, misalnya Srilanka dan Pakistan. Gambaran mengenai kasus perdagangan perempuan yang terjadi di India yang terus mengalami peningkatan.

Berdasar pada tabel 2.1. di atas maka dapat diketahui bahwa korban perdagangan perempuan di India dari tahun ke tahun semakin meningkat pada kaum perempuan dan anak, sedangkan korban kaum laki-laki dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa para perdagangan perempuan di India difungsikan untuk mendukung pekerja anak dan prostitusi, serta temnaga kerja ilegal. Beberapa wilayah yang menjadi tujuan perdagangan perempuan di India adalah New Delhi, Mumbay (Bombay), sedangkan negara lain yang menjadi tujuan perdagangan perempuan adalah Cina, Australia dan beberapa negara Asia Tenggara. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada peta 2.2. sebagai berikut :

Peta 2.2.

Wilayah Tujuan Perdagangan Perempuan India



Sumber : "India : Demography and Population", <http://www.worldbank.org>, diakses pada tanggal 30 November 2011.

Peta 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa tanda arah panah hitam merupakan wilayah-wilayah tempat asal perdagangan perempuan India. Pada peta ini dijelaskan bahwa terdapat negara-negara yang menjadi tujuan akhir, seperti halnya Kanada, Australia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan dan beberapa negara Asia Tenggara, namun terdapat juga negara yang dijadikan transit menuju negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya Timur-Tengah, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan.

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang pelaku dan korban perdagangan perempuan di India. Masing-masing dapat berjalan dan antara satu dengan yang lainnya sama-sama membutuhkan, sehingga tren penyebaran perdagangan wanita cenderung merata di segala usia.

Masalah perdagangan perempuan ternyata merupakan akumulasi dari kasus dari tahun ke tahun sehingga menjadi fenomena "gunung es". Puncaknya adalah pada tahun 1995 hingga 2008. Gambaran mengenai latar belakang dan perkembangan perdagangan perempuan di India pada rentang tahun tersebut akan dijelaskan pada sub-bab sebagai berikut.

C. Latar Belakang dan Perkembangan Tahun 1995-2008

Perkembangan dunia yang semakin kompleks akibat berkembangnya nilai-nilai globalisasi, ternyata tidak berpengaruh kuat bagi orientasi sosial-kemasyarakatan di India. Masalah perdagangan perempuan di negara ini masih menjadi isu yang mengemuka, meskipun sebenarnya masalah ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.

Keberadaan masyarakat rural India memang rawan menjadi obyek kekerasan. Dalam struktur masyarakat, keberadaan masyarakat ini menjadi bagian dari perbudakan baik secara nyata ataupun tidak nyata karena minimnya kemampuan dan kekuasaan dalam merubah kondisinya dalam struktur sosial kemasyarakatan di India.

Pada periode tahun 1998-2004, setidaknya terdapat empat hal yang harus dialami oleh kalangan di masyarakat rural masyarakat rural India sebagai obyek perdagangan perempuan di negara ini. Keempat masalah ini adalah :⁴

- a. Pelecehan seksual dan pemerkosaan.
- b. Pembunuhan.
- c. Eksploitasi tenaga kerja tanpa upah.
- d. Tidak adanya jaminan sosial yang mendukung.

Timbulnya masalah-masalah perdagangan perempuan India, yang berujung pada maraknya aksi kekerasan dan kriminalitas, tidak lepas dari dua hal yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya sikap superioritas dari kalangan yang memiliki kasta. Inilah yang melahirkan sikap kewenang-wenangan terhadap masyarakat lapisan bawah yang dianggap sebagai kalangan non-kasta, dalam perkembangannya masalah ini tidak kunjung terselesaikan karena dijalankan atas dasar pembenaran nilai budaya dan agama secara sepihak secara turun-temurun.
- b. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah akibat terisolasinya masyarakat lapisan bawah dari kehidupan sosial di India. Inilah yang kemudian berdampak pada tidak adanya upaya atau sikap putus asa dari kalangan Masyarakat Dalit dalam memperjuangkan ketertindasannya.

⁴ "India : Hidden Apartheid of Discrimination Aggaints Dalits", <http://www.hrw.org>., diakses pada tanggal 3 November 2011.

Pada periode tahun 1998-2004, permasalahan perdagangan perempuan India juga semakin mengemuka setelah banyak kalangan anak-anak yang terlibat pada kasus pekerjaan keras. Pekerja karena lilitan utang merupakan salah satu dari bentuk terburuk dari pekerja tidak hanya untuk anak-anak namun juga untuk orang dewasa. Pekerjaan yang mereka lakukan lebih banyak dilakukan di ladang atau di tempat pembakaran bata. Anak-anak dan atau orang dewasa ini bekerja untuk melunasi hutang mereka atau anggota keluarga mereka. Mereka bekerja keras dan sering mendapat siksaan fisik.

Terdapat ribuan pekerja anak-anak pada masyarakat rural karena lilitan hutang di India. Mereka juga merupakan anak-anak dari orang tua yang berasal dari kelompok atau kasta yang rendah. Anak kecil dijual oleh orang tua mereka untuk melunasi hutang yang mereka pinjam. Anak-anak dipekerjakan beberapa jam tiap hari hingga beberapa tahun. Anak-anak ini bekerja di pertanian, pertambangan, pembakaran bata, tukang bangunan, perikanan, pembuatan karpet, kembang api, korek api, pembuatan kaca, rokok, pemotongan permata dan penghalusan, elektronik, pencelupan, mencuci dan pekerjaan rumah. Sekitar 20 persen dari pekerja ini di perdagangan untuk melunasi pinjaman orang tuanya yang jumlahnya tidak seberapa, biasanya untuk perayaan seperti pernikahan di keluarga mereka.⁵

Salah satu bentuk terburuk dari pekerja karena lilitan utang pada kalangan anak-anak Masyarakat dalit dapat ditemukan dalam industri karpet. Di Kashmir

⁵ "Introducing Child Labour in India, with special reference to the hazards child labourers face", <http://www.oikonomia.it>, diakses tanggal 3 November 2011.

menunjukkan lebih 80 persen dari pekerja anak di pembuatan karpet merupakan pekerja karena lilitan utang. Pekerja-pekerja muda ini, banyak di antaranya berusia 8 hingga 9 tahun, mereka bekerja 20 jam sehari tanpa istirahat. Mereka harus menunduk dari pagi hingga petang yang dapat menghambat pertumbuhan fisik mereka. Beberapa dari anak-anak ini mulai bekerja pada umur 5 hingga 6 tahun, dan pada waktu mereka berumur 20 tahun mereka akan sekarat, mereka secara fisik, mental dan emosional akan kehabisan tenaga sehingga tidak dapat lagi bekerja dan hal ini berulang lagi ketika mereka meminta anak-anak mereka bekerja.

Ada beberapa alasan mengapa anak-anak korban perdagangan perempuan di India di paksa bekerja, antara lain:⁶

- a. Standard hidup keluarga yang sangat miskin yang meskipun mereka bekerja dengan keras. Mereka diuntungkan dengan tambahan bantuan. dikarenakan mereka tidak bisa mendapat uang yang cukup oleh karena itu anak-anak mereka dimanfaatkan.
- b. Hidup terpisah dari orang tua dan orang tua dimana anak-anak tinggal tidak bekerja atau pengangguran. Umumnya keberadaan anak-anak ini merupakan korban dari "*human trafficking*".
- c. Ayah yang suka mabuk dan tidak memberikan penghasilan terhadap keluarga memaksa ibu dan anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Budaya mabuk-mabukan telah menjadi budaya dari kalangan Masyarakat Dalit, minimnya tingkat pengetahuan membuat sebagian Masyarakat Dalit tidak

⁶ "Child labour in india", <http://www.unicef.org,m> diakses pada tanggal 7 November 2011.

sadar untuk berinvestasi ataupun mengembangkan usaha-usaha lainnya, apabila mendapatkan dana dalam jumlah yang kecil, maka banyak diantaranya yang dialokasikan ke hal-hal negatif, antara lain untuk mabuk-mabukan.

- d. Alasan lainnya adalah anak-anak tidak memiliki tempat tinggal, anak yatim piatu. Tinggal di jalan dimana dia merasa mendapat perlindungan, dan harus bekerja untuk tetap bertahan hidup.

Melalui paparan di atas maka dapat ditarik 'benang merah' bahwa latar belakang meningkatnya perdagangan perempuan ternyata berhubungan dengan banyaknya sektor-sektor yang menampung hal ini. Pada akhirnya ini membentuk sebuah kantong-kantong penampungan pekerja perempuan yang semakin sulit untuk ditangani oleh pemerintah India.

D. Dampak Yang Ditimbulkan

Secara umum masalah pelacuran anak melibatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan di India, namun anak perempuan yang dilacurkan lebih umum terjadi ketimbang anak laki-laki yang dilacurkan. Diperkirakan lebih dari 100.000 perempuan menjadi pelacur di Bombay, pusat industri seks di Asia. Ini kemudian memunculkan masalah baru, antara budaya hedonis yang tidak sesuai dengan budaya Timur hingga perkembangan HIV-AIDS di India yang telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan.

Pemerintah India memperkirakan sekitar 400.000 anak bekerja di sektor ini. Menurut UNICEF, hampir 15 persen masuk kedalam pekerjaan ini sebelum berumur

15 tahun, dan 25 persen masuk saat berumur 15 hingga 18 tahun. Menurut pemerintah India diperkirakan, kurang lebih 25.000 anak dilacurkan di kota metropolitan seperti: Bangalore, Calcutta, Chennai, Delhi, Hyderabad dan Mumbai. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pada periode tahun 1998-2004 Masyarakat Dalit juga kerap kali terlibat aksi aktifitas ilegal terkait dengan himpitan perekonomian yang semakin berat. Beberapa aktifitas ini adalah :

- a. Mengemis: anak-anak dengan kecacatan dapat dengan mudah terjebak dalam situasi dimana perdagangan manusia ditujukan untuk mengemis. Kemiskinan dan kecacatan merupakan kombinasi yang ideal untuk anak-anak untuk diperdagangkan dimana ada keyakinan bahwa kecacatan akan menarik simpati orang-orang.
- b. Perdagangan organ tubuh: walaupun informasi yang tersedia sangatlah sedikit pada kasus ini, laporan dari salah satu surat kabar dari orang yang bekerja perdagangan manusia menjelaskan bahwa perdagangan anak-anak untuk pengganti organ pada orang-orang yang mampu membelinya merupakan bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku.
- c. Menjual dan menyeludupkan obat-obatan terlarang: penggunaan anak-anak untuk menjual obat-obatan merupakan hal yang umum terjadi hal ini dikarenakan anak-anak jarang sekali dicurigai. Faktor utama yang mendorong anak-anak perempuan dari Nagaland menjadi pelacur adalah karena obat-obatan.

Kasus perdagangan perempuan di India telah mengakibatkan dampak yang serius. Apabila ditinjau dalam konteks sosial maka perdagangan perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM karena sebagian diantaranya melibatkan kaum perempuan dan anak, karena baik di negara asal dan tujuan para korban seringkali mendapat perlakuan yang kurang manusiawi, antara lain menyangkut tempat tinggal, intimidasi dan lain-lainnya.

Pada akhirnya para korban perdagangan perempuan, meskipun pada awalnya masing-masing sama-sama membutuhkan, namun saat dipekerjakan mereka kerap kali memperoleh perlakuan kasar bagi dari majikan, lingkungan hingga para konsumen itu sendiri. Dengan kata lain mereka rawan menjadi obyek kejahatan terorganisir dan berlaku secara sistemis.

Perdagangan perempuan di India juga telah menimbulkan efek perluasan pengaruh, antara lain memicu pembunuhan, penghilangan dan pemerkosaan. Gambaran mengenai dinamika kasus-kasus tersebut di India dapat dilihat pada uraian tabel 2.3. sebagai berikut.

Tabel 2.3.

**Kasus Pelanggaran HAM Akibat *Women Trafficking* Mencakup Pembunuhan,
Penghilangan dan Pemerksaan India**

CRIMES AGAINST WOMEN (2005-2010)

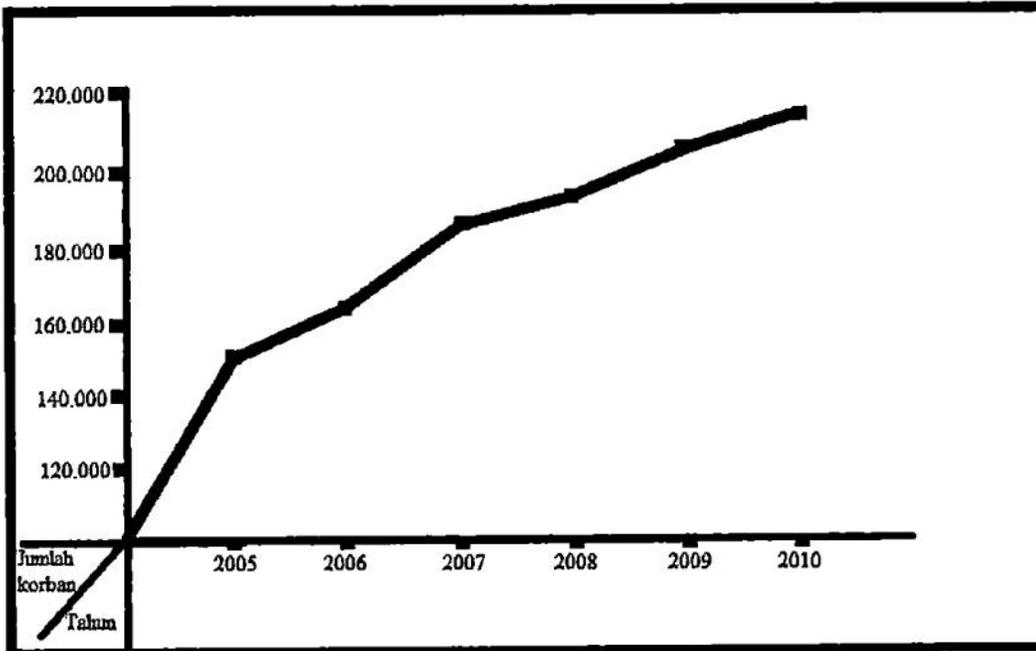
CRIME	YEAR						% VARIATION
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	IN 2010 OVER 2009
rape	18,359	19,348	20,737	21,467	21,397	22,172	3,6
Incest Rape	N/A	N/A	N/A	309	404	288	-10,3
kidnapping & Abduction	15,750	17,414	20,416	22,939	25,741	29,795	15,7
suicide Death	6,787	7,618	8,093	8,172	8,383	8,391	0,1
murder	58,319	63,128	75,930	75,930	89,546	94,041	5
Sexual Abuse	34,175	36,617	38,734	40,413	38,711	40,613	4,9
Sexual Harassment	9,984	9,966	10,950	12,214	11,009	9,961	-9,5
Transportation of Girls	149	67	61	67	48	36	-2,5
Anti Prevention Act	1	0	0	1	0	0	-
Human Trafficking	5,908	4,541	3,568	2,659	2,474	2,499	1
Decent Representation for women	2,917	1,562	1,200	1,025	845	895	5,9
Widow Prohibition	3,204	4,504	5,623	5,555	5,560	5,182	-8,3
Total	1,55,553	1,64,765	1,85,312	1,95,856	2,03,804	2,13,585	4,8

Sumber : "Women Crimes", <http://www.searchindia.com>, diakses pada tanggal 28 april 2012.

Sejak tahun 1993 hingga 2009 ternyata kasus pelanggaran HAM akibat perdagangan perempuan mengalami tren peningkatan. Gambaran yang terus naik dimulai dari tahun 2005, dapat dilihat pada diagram 2.1. sebagai berikut :

Diagram 2.1.

**Tingkat Fluktuasi Pelanggaran HAM Akibat Women Trafficking di India
Tahun 2005-2010**



Uraian tabel dan diagram diatas sekaligus menegaskan bahwa kasus pembunuhan, penghilangan dan perkosaan di India tidak lepas dari lemahnya kontrol yang dijalankan oleh pemerintah India. Sebagian diantaranya terjadi akibat adanya friksi antara sesama korban women trafficking dalam memperebutkan sumber daya ekonomi ataupun akibat keterkaitan *women trafficking* dengan kasus-kasus kejahatan lainnya. Sebagai contoh tentang hal tersebut, yaitu :⁷

⁷ "Recent Research on Human Trafficking in Mainland South Asia", <http://www.kyotoreview.ac.jp>, diakses pada tanggal 8 November 2011.

- a. Kasus penampungan di Nagaland pada bulan Desember 2007 dimana para korban human trafficking terlibat konflik dengan penduduk sekitar yang berakibat tiga orang tewas.
- b. Kasus pemerkoaan di penampungan korban *human trafficking* di Andra Pradesh pada bulan Juni 2006 yang berakibat pada meninggalnya dua orang korban *human trafficking* akibat terjadinya pendarahan akut.

Pernyataan lainnya yang menegaskan tentang semakin meningkatnya korban *women trafficking* di India yang di dominasi oleh kalangan perempuan dan anak-anak, juga ditegaskan oleh pernyataan lembaga Amnesty Internasional yang menyatakan sebagai berikut :

“...besarnya korban *human trafficking* dari India tidak lepas dari faktor permintaan, dimana korban masalah ini dapat dikembangkan ke arah zona-zona informal apabila pekerjaan-pekerjaan formal ternyata tidak ada atau kurang memiliki proporsi yang besar. Kaum perempuan dan anak-anak juga bersedia untuk dibayar murah.”⁸

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang berbagai dampak yang ditimbulkan atas perdagangan perempuan di India. Kemudian pada sub-bab selanjutnya akan diuraikan tentang kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah ini.

⁸ “Southeast Asian Human Trafficking : Descriptions and Background Case”, <http://www.amnestyinternational.org.>, diakses pada tanggal 4 November 2011.

E. Kebijakan Pemerintah India Dalam Menangani Perdagangan Perempuan di India

Promosi kesetaraan HAM di India yang dijalankan oleh Atal Behari Vajpayee dalam menangani masalah perdagangan perempuan di India tidak lepas dari upayanya dalam membangun nilai-nilai kesetaraan secara langsung yang bersifat mempengaruhi bagi kalangan Masyarakat India. Promosi HAM memang untuk membangun kondisi Masyarakat India yang berlaku secara holistik, artinya sebuah ketentuan yang diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kondisi yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini adalah India.

Secara harafiah holistik adalah berarti menyeluruh dalam scop atau wilayah tertentu, sedangkan dalam konteks penerapan HAM secara holistik berarti realisasi yang terbatas scop atau wilayah tertentu. Hal ini sekaligus membentuk karakteristik khusus yang membedakan dengan regional/wilayah lainnya karena terdapat penyesuaian-penyesuaian muatan (nilai-nilai) lokal.⁹

Berdasar pada pernyataan-pernyataan lainnya, penerapan HAM secara holistik adalah penerapan HAM secara menyeluruh dalam konteks wilayah tertentu, yang dipengaruhi oleh tata nilai regional sehingga mempunyai wajah dan karakteristik baru, akibat adanya penyesuaian-penyesuaian dan mekanisme adaptasi nilai-nilai setempat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi HAM secara holistik pada dasarnya lebih bersifat lentur dan akan berkembang sesuai dengan

⁹ "Dinamika Perjuangan HAM di Berbagai Belahan Dunia", Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia : Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia Press, Bogor, 2005, hal.105.

perkembangan masa, tanpa harus dipaksakan oleh pihak-pihak dari luar konteks regional tersebut.

Dalam rangka mempromosikan nilai-nilai HAM, keberadaan "*stake holder*" (pemegang kendali) memiliki peranan yang vital bagi keberhasilan program tersebut. Hal ini karena keberadaan *stake holder* yang juga sebagai pembuat kebijakan (*decision maker*) memiliki otoritas yang besar untuk memobilisasi institusi-institusi dan aparaturnya untuk menjalankan promosi tentang HAM.

Gambaran mengenai konseptual di atas juga berlaku bagi upaya Vajpayee dalam mempromosikan nilai-nilai HAM, terkait dengan masalah diskriminasi pada Masyarakat Dalit di India. Keberadaan Vajpayee sebagai Perdana Menteri India tentunya memiliki peranan yang vital sebagai *stake holder*, yang dapat dengan mudah memobilisasi sumber daya negara yang ada. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa Vajpayee lebih mampu menunjukkan perannya, dibandingkan dengan figur-figur pemimpin lainnya di India.

Upaya promosi Atal Behari Vajpayee dalam penerapan HAM secara holistik di India, memang memiliki perbedaan yang kuat dengan mekanisme HAM secara universal. Definisi HAM secara universal adalah HAM secara mutlak tanpa prasyarat, yang artinya pengakuan terhadap hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak dia

lahir dan merupakan pemberian Tuhan.¹⁰ Beberapa ketentuan penting dari HAM universal adalah :¹¹

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan
- c. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain
- d. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
- e. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kelima hal tersebut menjadi bagian dari ketentuan HAM dasar internasional yang berlaku secara universal yang terus di upayakan oleh Vajpayee melalui media promosi. Mekanisme penerapan HAM secara universal dan secara holistik lebih merupakan hubungan senior-junior, dimana HAM secara universal lebih bersifat umum, namun belum tentu sesuai dengan karakteristik regional di dunia, khususnya wilayah yang didominasi komunitas negara dunia ketiga (negara miskin-berkembang). Mekanisme HAM secara universal lebih didominasi oleh negara-negara Barat yang telah berpengalaman dalam kurun waktu relatif panjang terkait dengan pembelajaran HAM.¹²

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui bahwa upaya promosi nilai-nilai kesetaraan HAM oleh Vajpayee adalah berorientasi secara holistik dengan tidak merubah secara cepat, namun lebih bersifat mempengaruhi. Beberapa bentuk promosi

¹⁰ "The Human Right on Declaration of Independent United States of America", <http://www.state.gov>, diakses pada 8 November 2011.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Vajpayee dalam mengatasi diskriminasi pada Masyarakat Dalit antara lain sebagai berikut :

- a. Melalui even-even pidato kenegaraan, misalnya pada Sidang parlemen India pada tahun 2002, dimana Pemerintah India menyatakan dukungan bagi realisasi HAM, termasuk mendukung pemberdayaan Masyarakat Dalit. Disamping itu, Vajpayee juga mengemukakan pidatonya saat meresmikan perumahan di Mumbay bahwa India merupakan negara yang terbuka dan mengakui adanya keaneka-ragaman etnis, termasuk Masyarakat Dalit.¹³

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Vajpayee menyatakan bahwa “Tidak benar adanya apabila masyarakat India membeda-bedakan antara komunitas satu dengan yang lainnya, kondisi Masyarakat Dalit di India yang dianggap sebagai obyek ketertindasan harus segera diakhiri karena mereka bukan butuh, tapi mereka berhak.”¹⁴

- b. Melalui media cetak dan elektronik, misalnya program Atal Behari Vajpayee melalui iklan-iklan pada surat kabar lokal dan nasional, serta melalui media televisi dan radio yang dijalan secara kontiyu dan periodik setiap bulan. Sebagai contoh tentang hal ini adalah program iklan media cetak dan elektronik yang bertajuk “*Save India*”. Promosi ini menyatakan sikap anti-diskriminasi di kalangan masyarakat India, program ini pada media elektronik berdurasi sekitar 3 menit yang disiarkan di sela-sela acara hiburan atau acara

¹³ “Hindus Support Dalit Candidat at Tamil Nadu”, <http://www.indianchristian.in.>, diakses pada tanggal 6 November 2011.

¹⁴ Diterjemahkan dari data asli Berbahasa Inggris, *Ibid*.

formal (*news*) di stasiun pemerintah dan swasta yang berada di bawah naungan *India Broadcasting Association* yang disupervisi oleh lembaga swadaya masyarakat India.¹⁵

Pada media cetak, upaya promosi yang dijalankan oleh Vajpayee dijalankan melalui spot iklan masyarakat di beberapa harian surat kabar di India, antara lain *India Times*, *Surat Kabar Hindustan* dan *Delhi News*. Materi iklan yang diberikan bervariasi dan umumnya dipublikasikan dua hingga tiga kali dalam seminggu.¹⁶

- c. Melalui penyuluhan langsung, misalnya dengan pembagian selebaran, pamflet, poster dengan melibatkan insitusi terkait baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Beberapa program promosi Vajpayee dalam menangani diskriminasi rasial pada Masyarakat Dalit di India telah berhasil dijalankan di kota-kota yang menjadi “zona merah” sebagai wilayah yang banyak bermukim Masyarakat Dalit, antara lain pinggiran selatan New Delhi, Jaipur dan Nagaland. Program ini terealisasi masing-masing pada bulan Februari 2003 dan September 2004.¹⁷

¹⁵ “Save of India : Vajpayee to Joint Volunteer to Against Racial Discrimination”, <http://www.iseaas.edu>, diakses pada tanggal 6 November 2011.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ “India : “Hidden Apartheid” of Discrimination Aggaints Trafficking”, <http://www.hrw.org>, diakses pada tanggal 6 November 2011.

F. Kegagalan Pemerintah India Dalam Menangani Perdagangan Perempuan di India

Kegagalan pemerintah India dalam menangani masalah perdagangan perempuan ternyata merujuk pada kondisi yang berkembang di India bahwa secara faktual masalah perdagangan perempuan belum dapat ditekan laju perkembangannya. Atau dengan kata lain sejak tahun 1995 hingga 2008 dinamika perdagangan perempuan di India masih mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dibuktikan tabel 2.2 dan diagram 2.1.

Mendekati tahun 2000 masyarakat India menghadapi kemiskinan yang parah. Beberapa kasus terjadi di wilayah Andhra Pradesh, Manipur, Tripura. Masalah ini semakin kompleks setelah terjadi kasus rawan pangan, iklim yang tidak kondusif yang menyebabkan kekeringan dan cuaca ekstrem. Akibatnya masyarakat wilayah rural sebagian diantaranya menjalankan peruntungan untuk masuk dalam perdagangan perempuan.

Masalah ini merupakan titik pangkal perdagangan perempuan karena motif mencari kehidupan yang lebih baik mendorong para obyek perdagangan perempuan untuk berspekulasi. Adanya tradisi sosial dan keterbelakangan masyarakat India. Di negara ini perempuan dianggap sebagai kelompok kelas dua yang terbatas pada akses bidang pendidikan, politik dan kiprah dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akibatnya banyak diantaranya perempuan di India yang terlibat perdagangan perempuan secara sadar atas dasar saling membutuhkan atau lebih tepatnya terdapat sebuah mekanisme simbiosis mutualisme.

Faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan perdagangan perempuan di India adalah adanya faktor penarik. Ketersediaan lapangan kerja di sektor-sektor formal, misalnya restoran, buruk kasar, karyawan hingga prostitusi sebagai obyek dari tujuan perdagangan perempuan. Ini berlangsung karena para korban sendiri menganggap bahwa kondisi ini jauh lebih baik daripada berada ketidakpastian di wilayah asalnya, meskipun konsekuensinya adalah minimnya perlindungan terhadap keselamatan dari para korban itu sendiri.